



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BKD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019
COVER



BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, Agustus 2019

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. SUCIONO

Pembina Tk I

NIP. 19610316 199303 1 004

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD	7
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD	Error! Bookmark not defined.
3.3 Program dan Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Rencana Kerja	Error! Bookmark not defined.
3.2 Pendanaan Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2019. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka

kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);

27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
30. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2016-2021. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2020.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan

Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan pembandingan Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen perubahan rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2019.

BAB II

EVALUASI RENJA BKD KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 1 urusan 6 program dengan 65 kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Target Kinerja dan Anggaran BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
300201	BADAN KEUANGAN DAERAH								
30	Urusan Penunjang								
3002	Keuangan								
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						517.200.000	395.500	
3002.300201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	bulan	12	3	3	3.000.000	395.500	
3002.300201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	3	3	514.200.000	218.675.004,00	
3002.300201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	3	3	133.600.000,00	33.311.800,00	
3002.300201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	3	3	105.000.000,00	49.000.000,00	
3002.300201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	3	3	190.000.000,00	54.932.000,00	
3002.300201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	0	3	82.300.000,00	4.226.350,00	
3002.300201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	3	3	10.000.000,00	2.787.500,00	
3002.300201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	3	3	20.000.000,00	6.560.000,00	
3002.300201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	3	3	2.500.000,00	865.000,00	
3002.300201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	3	3	120.000.000,00	52.781.150,00	
3002.300201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	250	75	73	650.000.000,00	291.761.970,00	
3002.300201.01.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	bulan	12	3	3	175.000.000,00	33.680.000,00	
3002.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						1.100.000.000,00	99.454.776,00	
3002.300201.02.011	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2				0	0	580.000.000,00	0,00	
3002.300201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	1	60.000.000,00	24.710.000,00	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
3002.300201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	53	6	23	170.000.000,00	36.926.776,00	
3002.300201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	unit/lokasi/gedung	1			150.000.000,00	5.400.000,00	
3002.300201.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	2			30.000.000,00	0,00	
3002.300201.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	29	0	16	240.000.000,00	19.300.000,00	
3002.300201.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	3	3	50.000.000,00	18.518.000,00	
3002.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						30.000.000,00	5.105.000,00	
3002.300201.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	1	3	10.000.000,00	3.515.000,00	
3002.300201.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	6	4	3	10.000.000,00	1.590.000,00	
3002.300201.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	dokumen	1	0	0	10.000.000,00	0,00	
3002.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Pppm)						39.907.000,00	15.224.000,00	
3002.300201.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	12	3	0	29.907.000,00	12.724.000,00	
3002.300201.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	kali	3	0	1	10.000.000,00	2.500.000,00	
3002.36	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						1.919.000.000,00	798.184.300,00	
3002.300201.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	WP/WR	2500	375	643	290.000.000,00	124.017.000,00	
3002.300201.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	lembar	0	800	2102	106.000.000,00	60.502.000,00	
3002.300201.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	data	32000	0	0	905.000.000,00	451.897.500,00	
		Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate	peta	13	0	0			
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	buku	4	0	0			
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	buku	54	0	0			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	pelayanan	2000	200	0			
3002.300201.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	laporan	12	3	0	133.000.000,00	52.804.800,00	
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	buku	2	1	0			
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	kali	6	1	2			
3002.300201.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah	buah	1	0	0	90.000.000,00	15.150.000,00	
		Jumlah Komputer Anjungan ESPTD	unit	2	0	0			
		Jumlah TappingBox	unit	4	0	0			
3002.300201.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	lembar	88000	89977	152	335.000.000,00	50.813.000,00	
3002.300201.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	objek	2500	0	0	60.000.000,00	43.000.000,00	
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	buku	10	0	10			
3002.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah						1.610.000.000,00	347.858.800,00	
3002.300201.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	dokumen	2	0	0	100.000.000,00	720.000,00	
3002.300201.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	buku	2	0	1	50.000.000,00	0,00	
3002.300201.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	gedung/unit	3	0	1	75.000.000,00	2.775.000,00	
3002.300201.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	bidang	30	0	0	315.000.000,00	65.580.000,00	
		Jumlah Papan Nama Aset	bidang	55	0	0			
		Jumlah Patok batas tanah	buah	600	0	0			
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	bidang	900	0	0			
3002.300201.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	kali	5	0	5	70.000.000,00	67.405.000,00	
3002.300201.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	unit	27	4	0	620.000.000,00	143.882.800,00	
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	unit	36	5	0			
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	buah	67	9	0			
3002.300201.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	jenis	3	0	0	200.000.000,00	62.096.000,00	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
3002.300201.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	unit	3					
3002.300201.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	unit	50					
3002.300201.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	unit	1	0	0	150.000.000,00	5.400.000,00	
3002.300201.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	unit	3	0	0	30.000.000,00	0,00	
3002.38	Program Penyusunan Apbd Dan Pengelolaan Hibah Bansos						1.110.000.000,00	271.842.200,00	
3002.300201.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	dokumen	2	0	0	340.000.000,00	18.350.500,00	
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	dokumen	4	0	0			
3002.300201.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	0	0	280.000.000,00	67.613.400,00	
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	0	0			
3002.300201.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	bulan	12	3	3	145.000.000,00	59.091.625,00	
3002.300201.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	kali	2	0	0	105.000.000,00	51.234.175,00	
3002.300201.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	67	4	67	190.000.000,00	41.307.500,00	
3002.300201.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	bulan	12	0	0	50.000.000,00	34.245.000,00	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	kali	6	0	3			
3002.39	Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan						734.600.000,00	157.696.400,00	
3002.300201.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	laporan	14	0	0	100.000.000,00	22.109.250,00	
3002.300201.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	buku	1	0	0	50.000.000,00	0,00	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
3002.300201.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	bulan	12	3	3	159.600.000,00	46.275.000,00	
3002.300201.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	laporan	69	0	0	75.000.000,00	14.700.000,00	
		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	laporan	14	0	0			
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	buku	2	0	0			
3002.300201.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	dokumen	2	0	0	350.000.000,00	74.612.150,00	
3002.40	Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah						1.394.000.000,00	240.195.000,00	
3002.300201.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	Persen	54	8,1	12	230.000.000,00	75.200.000,00	
3002.300201.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	WP/WR	300	0	0	270.500.000,00	8.000.000,00	
3002.300201.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	bulan	12	3	3	189.000.000,00	48.980.000,00	
3002.300201.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	SSPD BPHTB	2000	200	524	91.000.000,00	29.280.000,00	
3002.300201.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	lembar	40	2	4	528.500.000,00	78.735.000,00	
3002.300201.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	WP	15	0	0	85.000.000,00	0,00	
3002.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah						731.650.000,00	216.063.200,00	
3002.300201.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	sisdur	1	0	0	65.000.000,00	19.361.250,00	
3002.300201.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	bulan	12	3	3	75.000.000,00	17.576.000,00	
3002.300201.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	bulan	12	3	3	41.000.000,00	215.000,00	
3002.300201.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	bulan	12	3	0	66.650.000,00	21.159.750,00	
		Jumlah laporan DAK per bidang	laporan/bidang	2	0	1			
3002.300201.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuangan daerah	orang	300	90	67	50.000.000,00	25.332.200,00	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	satuan	target	TW I	TW II			
3002.300201.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	data	3200	2240	0	20.000.000,00	13.050.000,00	
3002.300201.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	orang	3000	750	0	80.000.000,00	29.439.000,00	
3002.300201.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	PD/Unit Kerja	67	4	0	244.000.000,00	61.935.000,00	
3002.300201.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	kali	4	1	1	90.000.000,00	27.995.000,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP
- 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja BKD Tahun 2019 Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator		Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019 Triwulan II		Target Akhir RPJMD 2021
									Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	12	Opini BPK terhadap LKD	WDP	indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	15	Kemandirian Daerah (Kontribusi PAD terhadap Pendapatan)	18,78	persen	20,83	20,96	19,80	21	12,93	22%

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
BKD Kota Pekalongan Tahun 2019

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya professional ASN	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan profesionalitas ASN
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan sistem pelayanan public dan Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi

Tabel 3.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah
BKD Kota Pekalongan Tahun 2019

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020		
1	2	3	4	5
9. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada :				
Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK atas LKD	WTP	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD
			Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	
			Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam

jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja BKD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah		Opini BPK atas LKD	WTP
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Kemandirian Daerah (Kontribusi PAD terhadap Pendapatan)	21%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	10%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	1. BB
			2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2.450

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 8. Penyediaan peralatan rumah tangga

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi
Pengelolaan Pendapatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 4. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
 6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
 2. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
- e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 2. Penetapan pajak dan retribusi daerah
 3. Pemutakhiran data PBB
 4. Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
 5. Pengembangan SIM pendapatan daerah
 6. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
 7. Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
 4. Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
 5. Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
 6. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
 7. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
 8. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
 9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
 10. Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
 11. Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
- g. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
1. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
 2. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
 3. Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social
 4. Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 6. Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
- h. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 2. Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
 3. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
 4. Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
 5. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
1. Penagihan pajak dan retribusi daerah
 2. Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
 3. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
 4. Verifikasi BPHTB
 5. Pemeriksaan pajak daerah
 6. Gebyar Pajak Daerah

- j. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - 1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 - 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3. Fasilitasi MP TP-TGR
 - 4. Fasilitasi pelaporan DAK
 - 5. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - 6. Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
 - 7. Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
 - 8. Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
 - 9. Pendampingan transaksi non tunai

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di RPJMD yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/ rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Pelaporan keuangan daerah berkualitas
2. Persentase peningkatan PAD
3. Nilai evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD dan nilai keterbukaan informasi publik

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama tersebut untuk tahun 2019 dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel IKU, Program dan Kegiatan

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Pelaporan keuangan daerah berkualitas	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Penyusunan standar satuan harga
			Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

			Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
			Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah
			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
			Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
			Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
		Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
			Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
			Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
			Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Fasilitasi MP TP-TGR
			Fasilitasi pelaporan DAK
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
			Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
			Pendampingan transaksi non tunai
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
		Program peningkatan pendapatan daerah	Penetapan pajak dan retribusi daerah
			Pemutakhiran data PBB

			Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Pengembangan SIM pendapatan daerah Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Penagihan pajak dan retribusi daerah
2	Persentase peningkatan PAD	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
			Verifikasi BPHTB
			Pemeriksaan pajak daerah
			Gebyar Pajak Daerah
			Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
3	Nilai evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD dan nilai keterbukaan informasi publik	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah
			Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun ke-5 direncanakan dalam Perubahan Renstra BKD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	10%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. BB 2. 450

Pengukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja di atas, dapat di gambarkan dengan keberhasilan pada pencapain setiap sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Fokus kegiatan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, penetapan pajak dan restribusi daerah, penertiban dan penyampain SPPT PBB, pendataan objek pajak dan restribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2019 yaitu Persentase Peningkatan potensi pendapatan sebesar 4%.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot sebesar 63%, Presentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap sebesar 100%, Persentase OPD yang menyesuaikan laporan Persediaan sebesar 100%.

c. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

Fokus kegiatan adalah Penyusunan Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, penyusunan Raperwal tentang penjabaran APBD dan Perubahan APBD, fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Ketersedian Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu sebesar 100%, Presentase Penyaluran Hibah dan Bansos sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

Fokus kegiatan adalah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Presentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP sebesar 100%.

e. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

Fokus kegiatan adalah penagihan pajak dan restribusi daerah, pengembangan dan penyuluhan pajak dan restribusi daerah, dan pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah dalam rangka mendukung target indikator 2020 yaitu Presentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak sebesar 100%, Presentase Pencapaian Target Pendapatan Restribusi sebesar 100%.

f. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

Fokus kegiatan adalah pengendalian dan penertiban dokumen penatausahaan keuangan SKPKD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Persentase Penertiban SP2D atas pengajuan SPM dari OPD sebesar 100% Persentase Pencairan SP2D atas penertiban SP2D sebesar 100%.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja di butuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegoatan prioritas di Badan Keuangan Daerah tahun 2019. Kebutuhan pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Renja 2019 dengan Perubahan Renja 2019

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	514.200.000,00	594.200.000,00	80.000.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.000.000,00	131.600.000,00	28.600.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	82.300.000,00	62.300.000,00	-20.000.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000,00	800.000.000,00	150.000.000,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	-	580.000.000,00	580.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	-	-150.000.000,00
5	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	20.000.000,00	-	-20.000.000,00
6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	135.000.000,00	320.000.000,00	185.000.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Pppm)			0,00
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	29.907.000,00	29.907.000,00	0,00
2	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah			0,00
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	290.000.000,00	318.350.000,00	28.350.000,00
2	Penetapan pajak dan retribusi daerah	80.000.000,00	106.000.000,00	26.000.000,00
3	Pemutakhiran data PBB	950.000.000,00	955.000.000,00	5.000.000,00
4	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	133.000.000,00	115.000.000,00	-18.000.000,00
5	Pengembangan SIM pendapatan daerah	150.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00
6	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	310.000.000,00	335.000.000,00	25.000.000,00
7	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000,00	83.300.000,00	23.300.000,00
	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah			
1	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00
5	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
6	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
7	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	906.000.000,00	-	-906.000.000,00
9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	941.956.000,00	-	-941.956.000,00
10	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00
11	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos			
1	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	358.000.000,00	345.000.000,00	-13.000.000,00
2	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	240.000.000,00	318.000.000,00	78.000.000,00
3	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	160.000.000,00	145.000.000,00	-15.000.000,00
4	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	175.000.000,00	229.300.000,00	54.300.000,00
6	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan			
1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100.000.000,00	117.000.000,00	17.000.000,00

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
2	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	65.000.000,00	50.000.000,00	-15.000.000,00
3	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	120.000.000,00	259.600.000,00	139.600.000,00
4	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
5	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	350.000.000,00	370.000.000,00	20.000.000,00
	Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah			
1	Penagihan pajak dan retribusi daerah	230.000.000,00	250.400.000,00	20.400.000,00
2	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	246.000.000,00	270.500.000,00	24.500.000,00
3	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	210.000.000,00	207.100.000,00	-2.900.000,00
4	Verifikasi BPHTB	85.000.000,00	91.000.000,00	6.000.000,00
5	Pemeriksaan pajak daerah	145.000.000,00	528.500.000,00	383.500.000,00
6	Gebyar Pajak Daerah	78.000.000,00	85.000.000,00	7.000.000,00
	Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah			
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3	Fasilitasi MP TP-TGR	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
4	Fasilitasi pelaporan DAK	56.650.000,00	66.650.000,00	10.000.000,00
5	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00
8	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	234.000.000,00	244.000.000,00	10.000.000,00
9	Pendampingan transaksi non tunai	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00

Tabel 3.4

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif BKD Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja			APBD				Perubahan Renja			Pagu +/- (Rp)
			K	Satuan	Anggaran	K	Satuan	Anggaran		K	Satuan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
3002	Keuangan												
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen					Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi				
3002.300201. 01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	12	bulan	3.000.000	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	0
3002.300201. 01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	514.200.000	12	bulan	514.200.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	594.200.000	80.000.000
3002.300201. 01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	103.000.000	12	bulan	133.600.000	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	131.600.000	28.600.000
3002.300201. 01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	105.000.000	12	bulan	105.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	105.000.000	0
3002.300201. 01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	190.000.000	12	bulan	190.000.000	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	190.000.000	0
3002.300201. 01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	82.300.000	12	bulan	82.300.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	62.300.000	-20.000.000
3002.300201. 01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	0

3002.300201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	20.000.000	12	bulan	20.000.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	20.000.000	0
3002.300201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	12	bulan	2.500.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	0
3002.300201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	120.000.000	11	bulan	120.000.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	120.000.000	0
3002.300201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	250	orang/kali	650.000.000	250	orang/kali	650.000.000	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	550	Orang/ kali	800.000.000	150.000.000
3002.300201.01.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12	bulan	175.000.000	12	bulan	175.000.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12	bulan	175.000.000	0
3002.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen					Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga				0
3002.300201.02.011	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2							580.000.000	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	31	unit	580.000.000	580.000.000
									Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 3 yang diadakan	1	unit		0
3002.300201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	60.000.000	1	unit	60.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	60.000.000	0
3002.300201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	53	unit	150.000.000	53	unit	170.000.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	53	unit	170.000.000	20.000.000
3002.300201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit/lokasi /gedung	150.000.000	1	unit/lokasi /gedung		Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit/lokasi /gedung		-150.000.000

3002.300201.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	2	unit	20.000.000	2	unit		jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	2	unit		-20.000.000
3002.300201.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	29	unit	135.000.000	29	unit	240.000.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	42	unit	320.000.000	185.000.000
3002.300201.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	60.000.000	10.000.000
3002.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen									0
3002.300201.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	6	dokumen	10.000.000	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	0
3002.300201.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000	6	dokumen	10.000.000	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000	0
3002.300201.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	1	dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	1	dokumen	10.000.000	0
3002.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Pppm)	Persentase pengaduan	100										0
3002.300201.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	29.907.000	12	orang/bulan	29.907.000	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	29.907.000	0
3002.300201.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	20.000.000	3	kali	10.000.000	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	10.000.000	-10.000.000
3002.36	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	4	persen									0

3002.300201.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2500	WP/WR	290.000.000	2500	WP/WR	290.000.000	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2500	WP/WR	318.350.000	28.350.000
3002.300201.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	0	lembar	80.000.000	0	lembar	106.000.000	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	15000	lembar	106.000.000	26.000.000
3002.300201.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	32000	data	950.000.000	32000	data	905.000.000	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	32000	data	955.000.000	5.000.000
		Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate	13	peta		13	peta		Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate	13	peta		0
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	4	buku		4	buku		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	4	buku		0
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	54	buku		54	buku		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	54	buku		0
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2000	pelayanan		2000	pelayanan		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2000	pelayanan		0
3002.300201.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	133.000.000	12	laporan	133.000.000	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	115.000.000	-18.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	buku		2	buku		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	buku		0
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali		6	kali		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali		0
3002.300201.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah	1	buah	150.000.000	1	buah	90.000.000	Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah	1	buah	105.000.000	-45.000.000
		Jumlah Komputer Anjungan ESPTD	2	unit		2	unit		Jumlah Komputer Anjungan ESPTD	2	unit		0
		Jumlah TappingBox	4	unit		4	unit		Jumlah TappingBox	4	unit		0
3002.300201.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	88000	lembar	310.000.000	88000	lembar	335.000.000	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	88000	lembar	335.000.000	25.000.000
3002.300201.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	2500	objek	60.000.000	2500	objek	60.000.000	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	2500	objek	83.300.000	23.300.000
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	10	buku		10	buku		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	10	buku		0

3002.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1. persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot 2. Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap 3. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	61,5 100 100	61,5 100 100									0
3002.300201.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	dokumen	100.000.000	2	dokumen	100.000.000	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	dokumen	100.000.000	0
3002.300201.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	2	buku	50.000.000	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	0
3002.300201.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	3	gedung/unit	75.000.000	3	gedung/unit	75.000.000	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	3	gedung/unit	75.000.000	0
3002.300201.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	30	bidang	315.000.000	30	bidang	315.000.000	Jumlah sertifikat tanah	30	bidang	315.000.000	0
		Jumlah Papan Nama Aset	55	bidang		55	bidang		Jumlah Papan Nama Aset	55	bidang		0
		Jumlah Patok batas tanah	600	buah		600	buah		Jumlah Patok batas tanah	600	buah		0
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	900	bidang		900	bidang		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	900	bidang		0
3002.300201.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	70.000.000	5	kali	70.000.000	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	70.000.000	0
3002.300201.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	27	unit	620.000.000	27	unit	620.000.000	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	27	unit	620.000.000	0
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	unit		36	unit		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	unit		0
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	buah		67	buah		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	buah		0

3002.300201.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	3	jenis	200.000.000	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	200.000.000	100.000.000
3002.300201.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	3	unit	906.000.000	3	unit	0	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	3	unit		-906.000.000
3002.300201.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	50	unit	941.956.000	50	unit		Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	50	unit		-941.956.000
3002.300201.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	1	unit	100.000.000	1	unit	150.000.000	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	1	unit	150.000.000	50.000.000
3002.300201.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	3	unit	30.000.000	3	unit	30.000.000	Jumlah mobil jabatan yang direhab	3	unit	30.000.000	0
3002.38	Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos	1. Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu 2. Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 100	Persen Persen									0
3002.300201.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	358.000.000	2	dokumen	340.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	345.000.000	-13.000.000
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen		4	dokumen		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen		0
3002.300201.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	240.000.000	2	dokumen	280.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	318.000.000	78.000.000
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen		4	dokumen		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen		0
3002.300201.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	160.000.000	12	bulan	145.000.000	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	145.000.000	-15.000.000
3002.300201.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000	2	kali	105.000.000	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000	0

3002.300201.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	175.000.000	67	PD/Unit Kerja	190.000.000	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	229.300.000	54.300.000
3002.300201.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di kota pekalongan	12	kali	50.000.000	0
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	6	kali		6	kali		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali		0
3002.39	Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen									0
3002.300201.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	14	laporan	100.000.000	14	laporan	100.000.000				117.000.000	17.000.000
3002.300201.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	1	buku	65.000.000	1	buku	50.000.000				50.000.000	-15.000.000
3002.300201.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	120.000.000	12	bulan	159.600.000	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi laporan hutang/piutang OPD dalam 1 tahun	2	kali	259.600.000	139.600.000
									Jumlah pelaksanaan study orientasi untuk meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan dan wujud apresiasi diperolehnya WTP dalam 1 tahun	1	kali		0
									Jumlah orang yang mengikuti workshop/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	100	orang		0
3002.300201.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	69	laporan	75.000.000	69	laporan	75.000.000	Laporan LO dan LRA OPD	69	laporan	100.000.000	25.000.000

		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	laporan		14	laporan		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	laporan		0
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	buku		2	buku		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	buku		0
3002.300201.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	350.000.000	2	dokumen	350.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	370.000.000	20.000.000
3002.40	Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	1. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	Persen									0
		2. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	100	Persen									
3002.300201.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	54	Persen	230.000.000	54	Persen	230.000.000	Surat Tagihan yang Terbayar	54	Persen	250.400.000	20.400.000
3002.300201.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	246.000.000	300	WP/WR	270.500.000	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	270.500.000	24.500.000
3002.300201.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	210.000.000	12	bulan	189.000.000	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50	kali	207.100.000	-2.900.000
3002.300201.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2000	SSPD BPHTB	85.000.000	2000	SSPD BPHTB	91.000.000	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1500	BPHTB	91.000.000	6.000.000
									Jumlah Dokumen Zona Nilai Pasar yang disusun	1	dokumen		0
3002.300201.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	40	lembar	145.000.000	40	lembar	528.500.000	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	20	WP/WR	528.500.000	383.500.000
3002.300201.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	15	WP	78.000.000	15	WP	85.000.000	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	15	WP	85.000.000	7.000.000
3002.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah	1. Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	100	Persen									0
		2. Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100	Persen									

3002.300201.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	65.000.000	1	sisdur	65.000.000	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	65.000.000	0
3002.300201.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	bulan	75.000.000	12	bulan	75.000.000	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	kali	75.000.000	0
3002.300201.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	41.000.000	12	bulan	41.000.000	Jumlah Laporan Kerugian Daerah di MP TP-TGR yang disusun	12	Laporan	41.000.000	0
3002.300201.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	12	bulan	56.650.000	12	bulan	66.650.000	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Laporan DAK	12	kali	66.650.000	10.000.000
		Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan/bidang		2	laporan/bidang						0
3002.300201.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	300	orang	50.000.000	300	orang	50.000.000	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	300	orang	50.000.000	0
3002.300201.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3200	data	20.000.000	3200	data	20.000.000	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3200	data	20.000.000	0
3002.300201.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	3000	orang	70.000.000	3000	orang	80.000.000	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya selama 12 bulan	37200	orang	80.000.000	10.000.000
3002.300201.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	234.000.000	67	PD/Unit Kerja	244.000.000	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak selama 12 bulan	804	PD/Unit Kerja	244.000.000	10.000.000
3002.300201.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	100.000.000	4	kali	90.000.000	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	90.000.000	-10.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019. Penyusunan Perubahan Renja 2019 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, Agustus 2019

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. SUCIONO

Pembina Tk I

NIP. 19610316 199303 1 004